



Dinamika Kebijakan Geopolitik dan Geostrategis China dalam Era Multipolar: Implikasi bagi Keamanan Maritim Indonesia

China's Geopolitical and Geostrategic Policy Dynamics in the Multipolar Era: Implications for Indonesia's Maritime Security

**Sugiharto¹, Mulhady Putra², Muhammad Anas Kautsar^{3*},
Anisa Muftih⁴, Khairunnisa⁵**

Universitas Negeri Medan

Email: sugihgeo.unimed@gmail.com¹, mulhadyputra@unimed.ac.id², anaskautsar7@gmail.com³,
anisamuftih@gmail.com⁴, nstkhairunnisa3@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 31-03-2025

Revised : 02-04-2025

Accepted : 04-04-2025

Published : 06-04-2025

Abstract

The dynamics of China's geopolitical and geological strategic policies during the multipolar era have undergone rapid development, particularly in the context of maritime security in the Indo-Pacific region. China expanded its influence with its Belt and Road (BRI) initiative and increased military activity in the South China Sea, affecting Indonesia's regional stability and sovereignty. This study uses a descriptive qualitative approach using a literature research method to analyze the effects of China's geopolitical policies on Indonesia's maritime security. The results show that China's strategic expansion of Indonesia poses challenges in maintaining the exclusive economic zone (EEZ) and regional stability. Indonesia responded with increased maritime patrols, multilateral diplomacy and increased security cooperation with partner countries. The study highlights the importance of broad-based mitigation strategies to maintain national sovereignty and interests amid changing geopolitical constellations around the world.

Keywords: *China's Geopolitics, Indonesia's Maritime Security, South China Sea*

Abstrak

Dinamika kebijakan strategis geopolitik dan geologis Tiongkok selama era multipolar telah mengalami perkembangan yang cepat, khususnya dalam konteks keamanan maritim di wilayah Indo-Pasifik. China memperluas pengaruhnya dengan inisiatif inisiatif Belt and Road (BRI) dan peningkatan aktivitas militer di Laut Cina Selatan, yang mempengaruhi stabilitas regional dan kedaulatan Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan metode penelitian literatur untuk menganalisis efek kebijakan geopolitik China pada keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan strategis China terhadap Indonesia menimbulkan tantangan dalam menjaga zona ekonomi eksklusif (EEZ) dan stabilitas regional. Indonesia merespons dengan peningkatan patroli maritim, diplomasi multilateral dan peningkatan kerja sama keamanan dengan negara -negara mitra. Studi ini menyoroti pentingnya strategi pengurangan luas untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan minat di tengah -tengah perubahan konstelasi geopolitik di seluruh dunia.

Kata Kunci : *Geopolitik Tiongkok, Keamanan Maritim Indonesia, Laut China Selatan*



PENDAHULUAN

Dinamika kebijakan geopolitik dan geostrategis Tiongkok dalam era multipolar telah mengalami transformasi signifikan, terutama dalam konteks keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok secara aktif memperluas pengaruhnya melalui berbagai inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI), strategi militer di Laut China Selatan, serta modernisasi angkatan lautnya. Hal ini memunculkan tantangan bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, yang memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Pasifik, memiliki peran kunci dalam dinamika ini. Oleh karena itu, memahami bagaimana kebijakan Tiongkok berdampak pada keamanan maritim Indonesia menjadi suatu urgensi akademik dan praktis.

Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek geopolitik dan geostrategis Tiongkok, terutama dalam konteks hegemoni regional dan global. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti ekspansi militer Tiongkok di Laut China Selatan, kebijakan ekonomi BRI, serta respons dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Beberapa studi juga mengulas dampak kebijakan Tiongkok terhadap stabilitas kawasan, namun masih terbatas dalam membahas bagaimana dinamika ini memengaruhi keamanan maritim Indonesia secara spesifik. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek militer atau ekonomi secara terpisah tanpa melihat keterkaitan langsung antara kebijakan geopolitik Tiongkok dengan strategi keamanan maritim Indonesia. Oleh karena itu, kajian yang menghubungkan kebijakan geopolitik dan geostrategis Tiongkok dengan implikasi spesifik bagi keamanan maritim Indonesia masih sangat diperlukan.

Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan Tiongkok dalam era multipolar mempengaruhi keamanan maritim Indonesia. Beberapa peneliti fokus pada pengaruh geopolitik Tiongkok terhadap keamanan regional, sementara yang lain menitikberatkan pada respons negara-negara besar terhadap ekspansi Tiongkok. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dampak langsung dari kebijakan geopolitik dan geostrategis Tiongkok terhadap keamanan maritim Indonesia dalam era multipolar ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia serta merumuskan strategi mitigasi yang dapat diterapkan dalam menjaga keamanan maritim nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menunjukkan peningkatan agresivitas di Laut China Selatan, termasuk pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau buatan dan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan ketegangan dengan negara-negara ASEAN, tetapi juga mempengaruhi hubungan diplomatik dan stabilitas regional. Penelitian oleh (Avrilia & Aliabbas, 2024) menunjukkan bahwa agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan berdampak signifikan terhadap hubungan diplomatik dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia (Avrilia & Aliabbas, 2024)

Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial di Laut China Selatan, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. Penelitian oleh Nugraha (2021) menekankan bahwa strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik wilayah ASEAN sangat



penting dalam menghadapi dinamika geopolitik di Laut China Selatan (Ardinal, 2023; Isnaini et al., 2023).

Selain itu, kerja sama keamanan antara Indonesia dan Tiongkok juga menjadi aspek penting dalam menangkal ancaman keamanan maritim. Penelitian oleh Tao et al. (2020) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kerja sama antara kedua negara, masih terdapat masalah dalam rasa saling percaya dan mekanisme kerja sama keamanan yang perlu ditingkatkan (Tao et al., 2019).

Dalam menghadapi dinamika ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah diplomatik dan strategis untuk menjaga kedaulatan maritimnya. Misalnya, Indonesia telah meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perairannya, terutama di sekitar Kepulauan Natuna, untuk mencegah pelanggaran oleh kapal-kapal asing. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional (Ardinal, 2023).

Namun, tantangan tetap ada. Ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya dapat mempengaruhi stabilitas kawasan dan, secara tidak langsung, keamanan maritim Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi untuk menghadapi dinamika geopolitik dan geostrategis Tiongkok dalam era multipolar ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak kebijakan Tiongkok terhadap keamanan maritim Indonesia dan merumuskan strategi yang efektif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kebijakan geopolitik dan geostrategis China serta implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia dalam era multipolar.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer:** Dokumen resmi pemerintah China dan Indonesia, pernyataan kebijakan luar negeri, serta perjanjian bilateral/multilateral terkait keamanan maritim.
- b. Data Sekunder:** Jurnal akademik, buku, laporan lembaga think tank, berita dari media kredibel, dan analisis dari pakar geopolitik dan keamanan maritim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan berasal dari publikasi akademik, laporan lembaga internasional, serta analisis kebijakan dari berbagai institusi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasikan dokumen kebijakan, laporan resmi, dan wacana akademik. Selain itu,



penelitian ini juga mengadopsi pendekatan geopolitik untuk memahami bagaimana kebijakan China dalam era multipolar memengaruhi kepentingan strategis Indonesia, khususnya di sektor keamanan maritim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Geopolitik dan Geostrategis China dalam Era Multipolar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan geopolitik dan geostrategis China dalam era multipolar telah berkembang pesat, khususnya dalam konteks keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. China menerapkan strategi ekspansi melalui Belt and Road Initiative (BRI), sebuah proyek ambisius yang diluncurkan pada 2013 oleh Presiden Xi Jinping, yang bertujuan menghubungkan Asia Timur dan Eropa melalui jaringan infrastruktur darat dan maritim. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pembangunan jalur perdagangan tetapi juga memperkuat pengaruh ekonomi dan politik China di berbagai kawasan. Inisiatif ini telah diperluas ke Afrika, Oseania, dan Amerika Latin, secara signifikan memperluas pengaruh ekonomi dan politik China (Mcbride et al., 2023).

Selain itu, China secara aktif meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan dengan membangun pulau buatan dan infrastruktur militer. Sejak 2013, China telah menciptakan lebih dari 3.200 hektar lahan baru di Kepulauan Spratly melalui reklamasi besar-besaran. Tiga dari pulau-pulau ini telah sepenuhnya dimiliterisasi dengan sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat, peralatan laser dan jamming, serta jet tempur. Langkah-langkah ini telah memicu kekhawatiran dari negara-negara lain, terutama yang memiliki klaim di kawasan tersebut, karena dapat mengganggu stabilitas regional (Pletcher, 2023; The Guardian, 2022).

Dalam ranah diplomasi ekonomi, China menggunakan BRI untuk menawarkan proyek infrastruktur kepada negara-negara berkembang, seringkali melalui pinjaman dari bank milik negara. Pendekatan ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang dapat mempengaruhi keseimbangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa negara yang terlibat dalam proyek ini mengalami kesulitan dalam melunasi utang mereka, sehingga memberikan peluang bagi China untuk memperoleh pengaruh lebih besar dalam kebijakan domestik mereka.

Implikasi bagi Keamanan Maritim Indonesia

Kebijakan ekspansi China memiliki dampak signifikan terhadap keamanan maritim Indonesia. Peningkatan aktivitas militer China di Laut China Selatan menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran batas maritim dan klaim sepihak terhadap wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar Kepulauan Natuna. Pada Desember 2019 dan Januari 2020, Indonesia mengajukan protes diplomatik terhadap operasi penangkapan ikan ilegal oleh China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar UNCLOS (Ng, 2020).

Selain itu, aktivitas eksplorasi sumber daya laut oleh kapal-kapal riset China di ZEE Indonesia menimbulkan kekhawatiran mengenai eksploitasi sumber daya alam tanpa izin. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Beberapa nelayan Indonesia mengalami kesulitan dalam beroperasi di perairan



yang diklaim oleh China, yang mengancam kesejahteraan mereka. Situasi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk memperkuat regulasi maritim serta meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya laut yang dimiliki.

Dampak ekonomi dari ekspansi China juga terlihat dalam investasi infrastruktur maritim di Indonesia. Meskipun investasi ini memberikan keuntungan dalam bentuk pembangunan pelabuhan dan jalur perdagangan yang lebih efisien, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan China dalam proyek infrastruktur strategis dapat membatasi kedaulatan ekonomi Indonesia. Beberapa proyek investasi yang didanai oleh China di Indonesia sering kali menghadapi kritik terkait dengan transparansi, kualitas pekerjaan, dan dampak sosial bagi masyarakat lokal.

Strategi Mitigasi Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Maritim

Dalam menghadapi dinamika geopolitik ini, Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis, termasuk:

- 1. Peningkatan Kapasitas Keamanan Maritim:** Indonesia meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perairan strategis. Pada Desember 2024, Indonesia memperkuat patroli maritim sebagai respons terhadap peningkatan ketegangan di Laut Natuna Utara akibat insiden dengan kapal penjaga pantai China. Selain peningkatan patroli, Indonesia juga mulai mengembangkan teknologi pemantauan maritim berbasis satelit untuk mendeteksi aktivitas kapal asing secara real-time.
- 2. Pendekatan Diplomatik dan Multilateral:** Indonesia aktif dalam forum ASEAN dan perundingan internasional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Konsep "Dynamic Equilibrium" digunakan dalam diplomasi regional untuk menjaga stabilitas kawasan melalui keseimbangan kekuatan dan kerja sama antar negara. Selain itu, Indonesia mendorong penyusunan kode etik maritim yang lebih ketat dalam forum-forum internasional guna memastikan bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan tetap mematuhi aturan yang telah disepakati (Diplomacy, 2024).
- 3. Kerja Sama Keamanan Regional:** Indonesia memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat untuk meningkatkan kapasitas pertahanan maritim. Pada November 2024, Menteri Pertahanan dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat menyambut baik peningkatan kerja sama pertahanan, termasuk melalui kegiatan maritim bersama untuk mendukung keamanan regional. Kerja sama ini mencakup latihan militer gabungan, peningkatan kapasitas personel keamanan maritim Indonesia, serta berbagi informasi intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman di wilayah perairan Indonesia (Release, 2024).
- 4. Peningkatan Infrastruktur Maritim:** Pemerintah Indonesia membangun dan meningkatkan infrastruktur maritim, seperti pelabuhan dan pangkalan militer di wilayah perbatasan, guna meningkatkan kehadiran negara di wilayah yang rawan konflik. Strategi maritim Indonesia, yang dikenal sebagai Global Maritime Fulcrum, menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur untuk mendukung peran Indonesia sebagai poros maritim dunia. Proyek-proyek seperti pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta merupakan bagian dari strategi ini (Maulana Prasetya et al., 2024).



Selain langkah-langkah tersebut, Indonesia juga mulai mengembangkan kebijakan diversifikasi hubungan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap China. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Utara. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan menghindari tekanan dari satu negara tertentu.

Secara keseluruhan, dinamika kebijakan geopolitik dan geostrategis China di era multipolar memberikan tantangan yang kompleks bagi Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kedaulatan maritimnya di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Indonesia perlu terus memperkuat kapabilitas pertahanan maritim, mengembangkan strategi diplomatik yang lebih proaktif, serta meningkatkan kerja sama dengan negara-negara mitra untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi dalam menghadapi ekspansi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dinamika politik strategis geopolitik dan geologis Tiongkok di era multipolar memiliki dampak besar pada keamanan maritim Indonesia. Kebijakan ekspansi Tiongkok melalui inisiatif Belt and Street (BRI) dan modernisasi militer di Laut Cina Selatan telah meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan tantangan, khususnya di perairan Natuna. Indonesia melihat ancaman dalam bentuk pelanggaran teritorial oleh kapal Cina dan eksploitasi sumber daya laut yang dapat membahayakan ekonomi. Indonesia tidak memiliki klaim teritorial langsung di Laut Cina Selatan, tetapi posisi strategisnya akan menjadi pemain penting dalam menjaga stabilitas regional.

Menanggapi dinamis ini, Indonesia menggunakan berbagai strategi pengurangan, termasuk peningkatan patroli maritim, kerja sama dengan negara-negara mitra seperti AS, Jepang dan Australia, dan pendekatan diplomatik di Forum ASEAN. Selain itu, diversifikasi hubungan ekonomi juga merupakan strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Kebijakan pertahanan, diplomasi, dan bisnis diperlukan sehingga Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam mengatasi dinamika geopolitik regional. Untuk memeriksa strategi keamanan maritim berbasis teknologi, penyelidikan lebih lanjut disarankan untuk memeriksa pendekatan hukum internasional yang lebih baik terkait dengan tantangan ekspansi China.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinal, A. (2023). *Geopolitik Laut China Selatan bagi Kedaulatan Maritim Indonesia*. https://www.indomaritim.com/2023/04/27/geopolitik-laut-china-selatan-bagi-kedaulatan-maritim-indonesia/?utm_source=chatgpt.com
- Avrilia, P. R., & Aliabbas, A. (2024). DAMPAK AGRESIVITAS CHINA DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ASEAN. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(7), 47–58.
- Diplomacy, M. (2024). *Maritime Diplomacy in the ASEAN Maritime Security Strategic*



Partnership.

Isnaini, Sunny, & Mulyadi, M. (2023). Dampak Kebijakan Geopolitik & Geostrategis China Di Asia Pasifik Terhadap Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 111–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.51925/inc.v1i1i03.97>

Maulana Prasetya, D., Ladiqi, S., & Salleh, M. A. (2024). Back to the past: The roots of Indonesian middlepowermanship. *Asian Journal of Comparative Politics*, 2025(1957). <https://doi.org/10.1177/20578911241236518>

Mcbride, J., Berman, N., & Chatzky, A. (2023). China’s Massive Belt and Road Initiative: What was the original Silk Road. *Council on Foreign Relations*, 1–4.

Ng, J. (2020). The Natuna Sea Incident: How Indonesia Is Managing Its Bilateral Relationship With China . *The Diplomat*.

Pletcher, K. (2023). Spratly Islands. *Encyclopaedia Britannica* .

Release, I. (2024). *Australia-Japan-United States Trilateral Defense Ministers ’ Meeting November 2024 Joint Statement. November.*

Tao, L. W., Thamrin, S., & D.W, S. (2019). Kerjasama Keamanan China - Indonesia Guna Menangkal Ancaman Keamanan Maritim Kedua Negara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(3), 51–68.

The Guardian. (2022). China has fully militarized three islands in South China Sea, US admiral says. *The Guardian*.